INDEPENDENSI KEWENANGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI PASCA PERUBAHAN UNDANG-UNDANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

INDEPENDENCE OF AUTHORITY OF CORRUPTION ERADICATION COMMISSION POST CHANGE LAW CORRUPTION ERADICATION COMMISSION

Muhammad Habibi

Pusat Kajian Masyarakat Anti Korupsi dan HAM Universitas Lampung,
Email: biemuhammad81@gmail.com

Submitted: March 21, 2020; Reviewed: April 16, 2020; Accepted: April 30, 2020
DOI: 10.25041/cepalo.v4no1.1962

Abstrak

Pasca disahkannya Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kedudukan KPK yang mulanya merupakan lembaga non pemerintah kini termasuk dalam rumpun cabang kekuasaan pemerintah (*Auxiliary State Organ*). Keseluruhan lembaga pemberantasan korupsi (diluar Kepolisian dan Kejaksaan) yang masih bertahan sampai saat ini hanyalah Komisi Pemberantasan Korupsi yakni komisi independen yang diberi kewenangan *pro justitia* dalam melakukan penindakan tindak pidana korupsi selama ini bukan tanpa kritik. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya (sebelum revisi Undang-Undang), para ahli banyak mengkritik mengenai kelembagaannya yang berstatus “independen” tersebut. Tujuan penulisan jurnal ini mengetahui apakah perubahan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi telah melahirkan konsep lembaga negara independen bagi KPK. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Sementara itu, pendekatan yang dilakukan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Hasil dari penelitian ini menerangkan jika secara keseluruhan perubahan Undang-Undang KPK belum melahirkan konsep lembaga negara yang independen karena masih terdapatnya pengaturan pasal mengintervensi independensi kewenangan penindakan korupsi oleh KPK.

Kata Kunci: Kewenangan, Korupsi, Perubahan.

Abstract

After the enactment of Law Number 19 of 2019 concerning the Second Amendment to Corruption Eradication Commission (KPK) Law, the position of the KPK which was originally a non-governmental institution is now included in the branch of governmental power branches (Auxiliary State Organs). All corruption eradication institutions (outside the police and prosecutors) that still survive are only the Corruption Eradication Commission, namely an independent commission which has been given pro justitia authority in carrying

out acts of corruption so far not without criticism. In carrying out their duties and functions (before the revision of the Act), experts criticized many of the institutions that were "independent". The purpose of writing this journal is to find out whether the amendment of Corruption Eradication Commission Law has given birth to the concept of an independent state institution for the KPK. This study uses a normative legal research method, meanwhile, the approach taken uses a statutory approach and a conceptual approach. The results of this study explain if the overall amendment to the KPK Law has not yet given birth to the concept of an independent state institution because there are still provisions in the article to intervene in the independence of the KPK's authority for corruption.

Keywords: Authority, Amendments, Corruption.

A. Pendahuluan

Pasca perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi,¹ kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) termasuk dalam rumpun cabang kekuasaan pemerintah (*Auxiliary State Organ*). Perubahan terhadap kedudukan KPK bukanlah tanpa sebab, berdasar pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017, KPK termasuk lembaga cabang kekuasaan pemerintah yang menjalankan tugasnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.²

Komisi Pemberantasan Korupsi sendiri merupakan suatu lembaga negara yang memiliki fungsi pemberantasan dan pencegahan tindak pidana korupsi di Indonesia.³ *United Nations Convention Against Corruption* sebagai konvensi anti korupsi internasional telah mengamanatkan bagi negara dapat memberantas dan mencegah korupsi secara efektif serta efisien melalui intitusi-institusi pemberantasan korupsi.⁴ Indonesia pun telah meratifikasi konvensi anti korupsi tersebut dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi) tahun 2003 guna menjalin kerjasama internasional dalam rangka

¹ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan satu dari 160 Rancangan Undang-Undang (RUU) inisiatif (hanya diajukan satu lembaga) DPR-RI yang disetujui dan disahkan oleh Presiden yang diundangkan pada tanggal 17 Oktober 2019 oleh Plt. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tjahjo Kumolo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197) dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2015-2019. Rinciannya, dari total 160 RUU Prolegnas 2015-2019, 54 RUU diajukan inisiatif oleh DPR, 9 RUU inisiatif oleh DPD, 39 RUU inisiatif Pemerintah, 15 RUU diajukan DPR bersama DPD, 28 RUU diajukan DPR bersama Pemerintah, 5 RUU diajukan Pemerintah bersama DPD dan 9 RUU diajukan ketiganya bersama-sama. Dari 160 RUU tersebut, 94 RUU merupakan RUU aturan hukum baru sedangkan 66 RUU merupakan rancangan aturan perubahan dari undang-undang yang telah ada. Lihat Media Publikasi Peraturan Perundang-undangan dan Informasi Hukum Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia tentang Prolegnas 2015-2019. <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/prolegnas-2015-2019.html>, diakses pada 3 Mei 2020.

² Lihat Pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017, pengujian atas Pasal 73 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah terkait kewenangan DPR melakukan hak angket terhadap KPK sebagai lembaga negara independen.

³ Mahardika and Firman Wijaya, "KAJIAN YURIDIS FUNGSI PENCEGAHAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI PENGADAAN BARANG DAN JASA SECARA ELEKTRONIK DI PROVINSI DKI JAKARTA," *Jurnal Hukum Adigama* 1, no. 2 (2019): 1–25, 2, DOI: 10.24912/adigama.v1i2.2925.

⁴ Eddy Omar Sharif Hiarij, "UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST CORRUPTION DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA," *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 31, no. 1 (2019): 112–125, 114, DOI: 10.22146/jmh.43968.

pemberantasan dan pencegahan tindak pidana korupsi secara lokal dan internasional.⁵ Sebelumnya, KPK dibentuk berdasarkan amanat pasal 43 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal tersebut mengatur selambat-lambatnya dua tahun setelah undang-undang tindak pidana korupsi disahkan maka sudah harus terbentuk suatu lembaga khusus yang diberikan kewenangan memberantas tindak pidana korupsi.⁶

Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai komisi independen negara yang diberi kewenangan *pro justitia*⁷ dalam melakukan penindakan tindak pidana korupsi selama ini banyak di kritisi oleh para ahli hukum mengenai kelembagaannya yang berstatus “independen” tersebut seperti Romli Atmasasmita. Romli Atmasasmita berpendapat jika kelembagaan KPK merupakan *ad hoc* sehingga dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus mendorong Kepolisian dan Kejaksaan memberantas tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.⁸ Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi menyebutkan banyaknya kekurangan kinerja KPK selama ini berkaitan dengan kelemahan koordinasi antar penegak hukum (Kepolisian dan Kejaksaan), dugaan tumpang tindih kewenangan dengan instansi penegak hukum lain, belum adanya lembaga pengawas dan lain-lain sehingga mengatur KPK sebagai satu kesatuan aparatur lembaga pemerintahan bersama kepolisian dan kejaksaan melakukan upaya terpadu dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi serta mengurangi ketimpangan hubungan antar kelembagaan instansi penegak hukum dengan tidak memonopoli dan menyelisihi tugas satu dengan lainnya.⁹

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis akan menentukan rumusan masalah yang akan dibahas yakni pertama, bagaimanakah konsep lembaga negara independen berdasarkan teori lembaga negara independen serta apakah perubahan undang-undang KPK telah memperkuat kewenangan KPK sebagai lembaga negara independen dibidang penegakan hukum korupsi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yakni menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.¹⁰ Objek kajian dari penelitian ini yaitu kelembagaan Komisi Pemberantasan Korupsi yang diatur dalam undang-undang. Penelitian ini dilakukan menggunakan bahan hukum sekunder yang berasal dari data kepustakaan sedangkan bahan hukum dalam penulisan ini yaitu UUD 1945, Peraturan Perundang-

⁵ Lihat konsiderans Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang *United Nations Convention Against Corruption*. Dalam konsiderans dinyatakan alasan diratifikasinya konvensi tersebut karena bangsa Indonesia telah aktif dalam upaya pemberantasan korupsi serta bertujuan menjalin kerjasama internasional dalam pemberantasan dan pencegahan tindak pidana korupsi yang perlu didukung oleh pemerintah.

⁶ Bambang Dwi Baskoro, “PERSETERUAN KPK DENGAN POLRI DALAM UPAYA PEMBERANTASAN KORUPSI,” *Masalah-Masalah Hukum* 42, no. 3 (2013): 336–345, 338, DOI: 10.14710/mmh.42.3.2013.336-345.

⁷ Maksud dari kewenangan *Pro Justitia* adalah kewenangan untuk mengambil tindakan hukum secara sah dan konstitusional dalam menegakkan hukum (*law enforcement*). Kewenangan ini dimiliki oleh lembaga negara yang memiliki wewenang, tugas dan fungsi menegakkan hukum semata-mata untuk kepentingan keadilan. Artinya Komisi Pemberantasan Korupsi pun merupakan salah satu lembaga negara yang memiliki kewenangan *Pro Justitia* yakni melaksanakan tugas Penyelidikan, Penyidikan, Penuntutan serta Eksekusi terhadap perkara tindak pidana korupsi. <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5e006f96d6231/apa-itu-ipro-justitia-i/>, diakses pada 28 April 2020.

⁸ Romli Atmasasmita dkk, *Sisi Lain Akuntabilitas KPK dan Lembaga Pegiat Anti Korupsi* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 43.

⁹ Lihat penjelasan umum Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

¹⁰ Salim H.S. dan Erlies Septiana Nurbaini, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), 12

Undangan yang berkaitan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi. Sementara itu, pendekatan yang akan dilakukan yakni menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan pertama digunakan untuk menemukan asas-asas hukum pengaturan komisi pemberantasan korupsi sebagai lembaga negara independen dan pendekatan kedua digunakan untuk menemukan doktrin-doktrin yang berkaitan dengan konsep suatu lembaga negara independen.

B. Pembahasan

1. Konsep Lembaga Negara Independen Berdasarkan Teori Lembaga Negara Independen

Perkembangan ketatanegaraan dan sistem pemerintahan yang modern saat ini justru banyak melahirkan lembaga negara independen (*Auxiliary Institution*). Hadirnya lembaga-lembaga negara independen merupakan kebutuhan negara dalam menjangkau akses pelayanan publik kepada masyarakat dimana terdapatnya keterbatasan lembaga negara utama menjangkau hal tersebut. Lembaga negara independen merupakan lembaga negara penunjang bagi lembaga negara utama dalam menjalankan fungsi pemerintahan, lebih tepatnya fungsi administratif kepada publik. Seperti kondisi pemerintahan Amerika Serikat misalnya, perkembangan pesat kapitalisme membuat pemerintah kesulitan melayani kebutuhan masyarakat sehingga pemerintah Amerika Serikat membentuk “*Administrative Agency*” atau lembaga pendukung. Kedudukan *Administrative Agency* tetap berada dalam lingkup eksekutif, namun dalam *Administrative Agency* terdapat dua bentuk lembaga yakni “*executive agency*” dan “*independent agency*”.¹¹ Perbedaan keduanya terdapat pada pengaruh Presiden terhadap lembaga tersebut, jika pembentukan struktur organisasi dan pengangkatan anggota diatur oleh Presiden, lembaga tersebut dikatakan sebagai “*executive Agency*”. Sebaliknya, jika tidak terdapat peran Presiden dalam pembentukan struktur organisasi dan pengangkatan anggota maka lembaga tersebut dikatakan sebagai “*Independent Agency*”.¹²

Pendapat tersebut sejalan dengan gagasan George Jellinek yang menganggap berdasarkan kedudukannya, lembaga negara dibagi menjadi dua golongan yakni lembaga negara langsung (*unmittenbare organ*) seperti kepala negara, dewan atau majelis perwakilan serta majelis kehakiman (peradilan) dan lembaga negara tidak langsung (*mittenbare organ*) yakni lembaga yang dibawah kekuasaan ketiganya untuk membantu menjalankan tugas dan fungsi lembaga langsung. George Jellinek menambahkan satu kedudukan lembaga yang berfungsi memperkuat lembaga negara utama (*unmittenbare organ/main state's organs/primary constitutional organs*) yakni lembaga negara penunjang (*auxiliary organs*). Lembaga penunjang tersebut diidealkan independen karena kedudukannya diluar lembaga negara utama, bahkan terkadang tugas dan fungsi lembaga penunjang ini bersifat campuran dari *trias politica* karena sewaktu-waktu dapat berfungsi eksekutif, legislatif bahkan yudikatif.¹³

Untuk mengukur independensi dari suatu bentuk lembaga negara independen, menurut pendapat Zainal Arifin Mochtar¹⁴ harus memuat delapan indikator untuk menentukan suatu lembaga dikatakan komisi independen yakni, pertama lembaga tersebut dibentuk diluar

¹¹ Idul Rishan, “RELEVANSI HAK ANGKET TERHADAP KOMISI NEGARA INDEPENDEN,” *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi* 10, no. 1 (2018): 44–64, 48, DOI: 10.28932/di.v10i1.1031.

¹² Wawan Heru Suyatmiko and Alvin Nicola, “MENAKAR LEMBAGA ANTIKORUPSI: STUDI PENINJAUAN KINERJA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI,” *Jurnal Antikorupsi Integritas* 5, no. 2, 2019: 35–56, 36, DOI: 10.32697/INTEGRITAS.V5I2.465.

¹³ Luthfi Widagdo Eddyono, “INDEPENDENCE OF THE INDONESIAN CONSTITUTIONAL COURT IN NORMS AND PRACTICES,” *Constitutional Review* 3, no. 1 (2017): 71–97, 80, DOI: 10.31078/consrev314.

¹⁴ Zainal Arifin Mochtar merupakan ahli hukum tata negara dan peneliti dari Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM).

lembaga negara utama, walaupun menjalankan fungsi yang sama dengan lembaga negara utama. Kedua, proses pemilihan pimpinan lembaga dilakukan menggunakan sistem seleksi, bukan menggunakan kekuatan politik. Ketiga, proses pemilihan pimpinan suatu lembaga independen tersebut tetap melibatkan lembaga negara lain dalam kerangka fungsi *check and balances*.¹⁵ Keempat, proses pemilihan dan pemberhentian pimpinan didasari pada aturan yang berlaku. Kelima, proses pemilihan pimpinan, rekrutmen anggota serta laporan kinerjanya dilaporkan langsung kepada masyarakat atau melaporkan kepada parlemen (DPR). Keenam, kepemimpinan lembaga bersifat kolektif kolegial. Ketujuh, bukan merupakan lembaga negara utama, tetapi tugas dan fungsi harus diatur secara tegas karena keberadaan lembaga tersebut penting guna transisi sistem ketatanegaraan yang selalu berkembang. Kedelapan, dapat mengeluarkan aturan sendiri yang diberlakukan bagi kepentingan internal lembaga maupun berlaku secara umum serta dibentuk berdasarkan konstitusi maupun peraturan perundang-undangan.¹⁶

Berkaitan dengan konsep lembaga negara independen, *United Nations Convention Against Corruption* telah merumuskan beberapa konsep-konsep independensi lembaga anti korupsi secara internasional. Beberapa konsep tersebut diantaranya, pertama, harus memiliki mandat yang jelas memberantas korupsi melalui strategi yang digunakan, seperti pencegahan, penindakan (penyidikan dan penuntutan), peningkatan kesadaran dan pendidikan anti korupsi melalui satu lembaga atau beberapa lembaga negara yang terkoordinasi dengan jelas. Kedua, lembaga anti korupsi tidak bekerja sendiri artinya harus melibatkan lembaga negara lain yang berwenang, masyarakat sipil, swasta dan melakukan kerjasama secara internasional. Ketiga, eksistensi yakni harus didirikan berdasarkan aturan hukum negara. Keempat, penunjukan pimpinan lembaga atau pegawai harus netral (tidak berafiliasi dengan partai politik) dan memiliki integritas. Kelima, lembaga anti korupsi harus memiliki kode etik kelembagaan. Keenam, pimpinan dan pegawai lembaga anti korupsi harus memiliki imunitas dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Ketujuh, lembaga anti korupsi harus diberikan kewenangan otonomi keuangan tanpa mengurangi standar akuntansi atau persyaratan audit negara. Kedelapan, lembaga anti korupsi harus memiliki akuntabilitas internal maupun eksternal,¹⁷ artinya lembaga anti korupsi harus menetapkan standar operasi prosedur yang jelas serta mematuhi aturan hukum dan bertanggung jawab sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan negara guna mencegah penyalahgunaan kewenangan. Kesembilan, lembaga anti korupsi harus melaporkan kinerja kepada publik secara langsung atau melalui parlemen negara minimal setahun sekali. Kesepuluh, lembaga anti korupsi harus melibatkan publik mencegah tindak pidana korupsi terjadi.¹⁸

Berdasarkan beberapa konsep lembaga negara independen tersebut dapat dipahami jika perkembangan modern sistem ketatanegaraan melahirkan berbagai macam lembaga negara, baik lembaga negara dengan fungsi utama maupun dengan fungsi pembantuan. Artinya, secara konsep kelembagaan negara saat ini tidak dilihat berdasarkan hierarki atau tingkatan kelembagaan, melainkan dilihat dari fungsi dari adanya suatu lembaga negara tersebut. Secara

¹⁵ Sulardi and Irmayadi Sastra, "CHECK AND BALANCES KEKUASAAN LEMBAGA NEGARA GUNA MENATA PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNMENT)," *Jurnal Hukum Replik* 5, no. 2 (2017): 184–199, 187, DOI: 10.31000/jhr.v5i2.926.

¹⁶ Denny Indrayana, *Jangan Bunuh KPK Kajian Hukum Tata Negara Penguatan Komisi Pemberantasan Korupsi* (Malang: Intrans Publishing, 2016), 57-58.

¹⁷ Achmad Badjuri et al., "PERANAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) SEBAGAI LEMBAGA ANTI KORUPSI DI INDONESIA (THE ROLE OF INDONESIAN CORRUPTION EXTERMINATE COMMISSION IN INDONESIA)," *Jurnal Bisnis Dan Ekonomi (JBE)* 18, no. 1 (2011): 84–96, 90.

¹⁸ Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, *Komitmen Global Indonesia Pada United Nations Convention Against Corruption dan G20 Anti-Corruption Working Group (ACWG) Tahun 2012-2018* (Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, 2019), 47-48.

ideal sudah pasti lembaga negara utama harus memiliki fungsi sebagai lembaga utama dan lembaga negara bantu harus berfungsi sebagai lembaga negara pembantu (*auxiliary state*) serta kedua pemisahan konsep kelembagaan negara ini harus saling berkoordinasi guna mewujudkan sistem pemerintahan yang *good governance*¹⁹.

2. Kelemahan Kewenangan Penindakan Korupsi Kpk Pasca Perubahan Undang-Undang

Perubahan Kedua Undang-Undang KPK ini tentu berawal dari Putusan MK Nomor 36/PUU-XV/2017 yang menyatakan KPK “idealnya” merupakan organ eksekutif (pemerintah) walaupun posisinya diluar dari pemerintah (independen). Putusan tersebut menyatakan bagaimanapun independensinya suatu lembaga negara independen (termasuk KPK) tetap dikategorikan sebagai lembaga negara yang menjalankan fungsi pemerintahan. Hal tersebut dikarenakan dalam melaksanakan tugas dan fungsi kelembagaan, KPK tetap menggunakan anggaran negara dan menyerahkan laporan kinerja kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden terkait akuntabilitas kelembagaan.²⁰ KPK sendiri pun dibentuk berdasarkan undang-undang dan tidak diatur secara eksplisit dalam UUD 1945. Tentulah jika KPK harus benar-benar melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan undang-undang pembentukannya, apabila tidak sesuai maka DPR dapat melakukan penyelidikan dan menyatakan pendapat jika suatu lembaga tersebut dalam menjalankan tugasnya bertentangan dengan undang-undang sehingga dapat melakukan hak angket guna melaksanakan fungsi pengawasan yang dimilikinya.²¹

Pada praktiknya sering terjadi tumpang tindih kewenangan antara KPK dengan Kepolisian dan Kejaksaan dalam menganani kasus tindak pidana korupsi. Mengutip pendapat ahli hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra dalam keterangan ahli sidang pansus angket KPK pada tahun 2017 yakni jika kekhawatiran pembentukan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi berpotensi terjadinya tumpang tindih kewenangan antara KPK dengan Kejaksaan dan Kepolisian sehingga pembentuk Undang-Undang mengatur limitasi kewenangan KPK dengan melakukan koordinasi serta supervisi yang berkaitan dengan pertama, kasus korupsi tersebut diduga mengalami kerugian negara satu miliar keatas (dibawah satu miliar bukan kewenangan KPK), kedua, melibatkan penyelenggara negara serta kasus tersebut meresahkan masyarakat secara luas.²² Pendapat lain dari Yusril Ihza Mahendra terhadap kondisi KPK saat ini adalah masyarakat masih memiliki paradigma hukum zaman dulu ketika melihat kondisi hukum saat ini. Pada awal reformasi negara sangat membutuhkan suatu lembaga negara yang dapat terbebas dari intervensi politik pemerintah, sehingga pembentuk Undang-Undang memasukan berbagai kewenangan ekstra kepada KPK dengan tujuan “*trigger mechanism*” atau menjadi stimulus kepada Kejaksaan dan Kepolisian dalam mengungkap perkara tindak pidana korupsi. Namun, lembaga negara yang diberikan kewenangan luar biasa tidak dapat permanen pembentukannya.²³ Pendapat

¹⁹ “*Good Governance*” merupakan istilah lain dari sistem tata kelola yang baik dalam pelayanan kepada masyarakat luas. Salah satu langkah dalam mewujudkan “*Good Governance*” ialah melakukan pelayanan publik karena fungsi pelayanan publik dimaknai sebagai fungsi kesejahteraan dalam negara. Seperti pendapat Prof. Bagir Manan dalam Majalah Varia Peradilan Tahun 2018, salah satu konsekuensi mengedepankan fungsi pelayanan (*public service*) adalah pengendoran fungsi politik pemerintahan daerah otonomi dan mengedepankan fungsi pelayanan masyarakat.

²⁰ Julpikar, “KEDUDUKAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DALAM PENETAPAN DAN PENGAWASAN APBN DI INDONESIA,” *De Lega Lata* 1, no. 1 (2016): 162–183, 176.

²¹ Idul Rishan, “BATAS KONSTITUSIONAL PENGGUNAAN HAK ANGKET TERHADAP KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI,” *Jurnal Konstitusi* 16, no. 3 (2019): 630–654, 640, DOI: 10.31078/jk1639.

²² Lihat Pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

²³ Pendapat Yusril Ihza Mahendra dalam keterangan ahli sidang Panitia Khusus Hak Angket KPK tahun 2017. Lihat Majalah Parlementaria Edisi 151 Tahun 2017 hlm 13.

tersebut sejalan dengan fakta banyaknya pembubaran lembaga-lembaga khusus yang berwenang melakukan tugas pemberantasan korupsi sebelum KPK dibentuk. Pandangan Yusril Ihza Mahendra mengusulkan terkait persoalan kelembagaan KPK yang dibenahi dalam perubahan undang-undang harus melihat kondisi hukum saat ini yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.²⁴ Permasalahannya, apakah dengan dirubahnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 menjadi Undang-Undang 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi telah memperkuat kewenangan independensi penindakan korupsi yang dilakukan KPK?

Dalam melihat pembentukan suatu undang-undang maka harus dilihat dasar dari alasan yang melatar belakangi undang-undang tersebut dibentuk melalui politik hukum pembentukan undang-undang. Politik hukum merupakan suatu *legal policy* atau kebijakan resmi negara terhadap pergantian hukum lama atau pembuatan hukum baru guna mencapai tujuan negara.²⁵ Melihat hal tersebut maka perlu diketahui alasan pembentukan undang-undang dalam konsiderans. Berikut akan dijelaskan perbedaan alasan pembentukan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019.

Tabel 1. Perbedaan konsiderans Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

UU No. 30 Tahun 2002	UU No. 19 Tahun 2019	Perbedaan
Lembaga pemerintah yang menangani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi	<ul style="list-style-type: none"> - Kepolisian, Kejaksaan dan KPK perlu ditingkatkan sinergitasnya sehingga masing-masing dapat berdaya guna dan berhasil dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi sesuai dengan Hak Asasi Manusia - Pelaksanaan tugas KPK perlu ditingkatkan melalui strategi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang komprehensif dan sinergis tanpa mengabaikan penghormatan HAM berdasarkan undang-undang 	<p>Pada undang-undang sebelumnya, lembaga pemerintah tidak efektif memberantas korupsi sehingga diperlukan lembaga negara yang akan efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi. Sedangkan dalam undang-undang yang saat ini berlaku, negara memerlukan sinergitas antar lembaga penegak hukum dalam rangka keberhasilan memberantas tindak pidana korupsi serta melakukan strategi pencegahan dan pemberantasan korupsi yang seimbang.</p> <p>Alasan lain dari perubahan undang-undang KPK yakni adanya tujuan perlindungan HAM sesuai dengan asas-asas HAM yang diatur dalam ketentuan undang-undang.</p>

²⁴ putera Astomo, "PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG DALAM RANGKA PEMBAHARUAN HUKUM NASIONAL DI ERA DEMOKRASI," *Jurnal Konstitusi* 11, no. 3 (2014): 577–599, 578.

²⁵ Mahfud, MD, *Politik Hukum di Indonesia* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2010), 1.

Pembentuk undang-undang menghendaki adanya sinergitas kinerja antara KPK dengan Kejaksaan dan Kepolisian dalam memberantas tindak pidana korupsi sebagaimana tujuan awal KPK dibentuk yakni menjadi lembaga “*trigger mechanism*”²⁶ bagi Kejaksaan dan Kepolisian dalam memberantas tindak pidana korupsi. Hal demikian terjadi dikarenakan KPK dalam menjalankan tugas dan fungsinya sudah tidak sesuai dengan kondisi hukum saat ini diantaranya :

- a. Sebagai lembaga negara independen, KPK merasa tidak bisa diangket oleh DPR;
- b. KPK tidak memerlukan organ pengawas dalam menjalankan kewenangan *pro justitia*;
- c. KPK lebih mengedepankan fungsi penindakan daripada fungsi pencegahan.

Ketiga alasan tersebut sejatinya telah di selesaikan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dimana pembentukan KPK telah dirumuskan dengan baik oleh pembentuk undang-undang sebagai lembaga negara independen. Namun, tidak semua rumusan pasal yang dibentuk telah mengatur KPK sebagai komisi atau lembaga negara independen. Berikut penulis akan merincikan beberapa materi rumusan pasal yang mengidealkan KPK (bahkan memperkuat kewenangan dari aturan sebelumnya) dan rumusan pasal yang justru menghapuskan nilai-nilai lembaga negara independen bagi KPK.

Rumusan pasal yang mengacu pada konsep lembaga negara independen diantaranya mengenai kedudukan lembaga. Ketegasan kedudukan lembaga KPK saat ini termasuk sebagai lembaga negara dalam rumpun eksekutif tetapi bukan lembaga eksekutif. Artinya dalam menjalankan tugas, KPK sama seperti lembaga eksekutif lain yang menjalankan kewenangan penegakan hukum tindak pidana korupsi (Kepolisian dan Kejaksaan) tetapi KPK tidak dibawah kendali (kekuatan) Presiden.²⁷

Selanjutnya, pasca perubahan aturan KPK, pembentuk undang-undang mempertegas status kepegawaian pekerja KPK sebelumnya bukan Aparatur Sipil Negara (ASN) kini menjadi (ASN). Berkaitan dengan asas-asas suatu lembaga negara independen, pembentuk undang-undang telah merumuskan dengan baik asas-asas lembaga negara independen yang harus dimiliki oleh KPK diantaranya kepastian hukum. KPK harus memiliki basis legitimasi legalitas kelembagaan sebagaimana diatur dalam konstitusi atau undang-undang (fungsi legalitas). Akuntabilitas, KPK harus mempertanggungjawabkan pelaksanaan kinerja lembaga kepada lembaga eksternal (DPR dan Pemerintah, fungsi *Checks and Balances*) serta penghormatan hak asasi manusia, KPK diatur untuk melaksanakan kewenangan, tugas dan fungsi khususnya di bidang penindakan berdasar pada nilai-nilai Hak Asasi Manusia secara universal.

KPK saat ini memiliki kewajiban melaksanakan kinerja nyata dalam fungsi pencegahan. Fungsi pencegahan ini diantaranya mendorong penegak hukum lain tegas dalam melakukan penindakan, bekerjasama dengan Badan Pemeriksa Keuangan mengawasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, memberikan standar administrasi pemerintahan yang baik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (*good governance*), meminta laporan kepada lembaga negara lain terkait tindakan pencegahan korupsi dan lain-lain. Penguatan lainnya yakni KPK berkewajiban melaksanakan seluruh putusan pengadilan berkaitan dengan tindak

²⁶ Mohamad Hidayat Muhtar, “MODEL POLITIK HUKUM PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA DALAM RANGKA HARMONISASI LEMBAGA PENEGAK HUKUM,” *Jambura Law Review* 1, no. 1 (2019): 68–93, 70, DOI: 10.33756/jalrev.v1i1.1988.

²⁷ Hendra Nurtjahjo, “LEMBAGA, BADAN, DAN KOMISI NEGARA INDEPENDEN (STATE AUXILIARY AGENCIES) DI INDONESIA: TINJAUAN HUKUM TATA NEGARA,” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 35, no. 3 (2017): 275–287, 78, DOI: 10.21143/jhp.vol35.no3.1518.

pidana korupsi (fungsi *due process of law*),²⁸ KPK berkewajiban mengkoordinasikan seluruh penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi kepada Kepolisian dan Kejaksaan (fungsi *Trigger Mechanism*) serta KPK berkewajiban melaksanakan dengan pendapat dengan lembaga lain yang fungsinya berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi (fungsi *Check and Balances*). Pengaturan yang paling penting adalah KPK berkewajiban melaksanakan tugas supervisi terkait pengawasan, penelitian, penelaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenang pemberantasan tindak pidana korupsi serta dapat mengambil alih fungsi penindakan apabila Kepolisian dan Kejaksaan sulit melaksanakan tugas secara baik, terdapat unsur campur tangan kekuasaan serta terdapat dugaan perlindungan pelaku tindak pidana korupsi dalam penanganan perkara (fungsi *Trigger Mechanism*).

Saat ini, KPK hanya berwenang melaksanakan fungsi penindakan terhadap perkara yang melibatkan aparat penegak hukum atau penyelenggara negara serta orang lain yang ada kaitan terhadap keduanya. Pembatasan kewenangan tersebut sejalan dengan pendapat Mahkamah Konstitusi dalam putusan nomor 012-016-019/PUU-IV/2006 yang menyatakan ketegasan pembatasan kewenangan KPK telah diatur dalam ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi diantaranya pembatasan relatif dan pembatasan mutlak. Pembatasan yang dimaksud adalah batas penindakan yang harusnya dilakukan KPK ialah tertuju pada aparat penegak hukum, penyelenggara negara atau orang lain yang berkaitan dengan keduanya. Hal tersebut merupakan batas kewenangan mutlak yang dimiliki KPK sedangkan perkara yang meresahkan masyarakat dan menyangkut nilai kerugian negara paling sedikit 1.000.000.000. (satu miliar rupiah) merupakan batas relatif, artinya apabila poin pertama tidak terpenuhi maka unsur lain pun tidak dapat dijalankan seperti penyelidikan, penuntutan terlebih lagi penuntutan perkara sebab KPK didirikan sejatinya sebagai lembaga *Trigger Mechanism* bagi lembaga lain yang belum optimal memberantas tindak pidana korupsi.

Sementara menurut penulis, rumusan pasal yang justru melemahkan independensi peran KPK dalam pemberantasan korupsi yakni pertama terkait pembentukan dewan pengawas, kedua terkait penyadapan dan terakhir terkait kewajiban mengeluarkan Surat Penghentian Penyidikan (SP3). Pembentuk undang-undang merasa jika KPK selama ini tidak memiliki lembaga pengawas dimana esensinya setiap lembaga negara harus dilakukan pengawasan agar terhindar dari kesewenang-wenangan.²⁹ Mengenai tugas dan fungsi dewan pengawas lebih tertuju mengawasi KPK dalam menjalankan kewenangan *pro justitia* seperti memberikan izin penyadapan, penggeledahan, penyitaan serta kewenangan menerima laporan penghentian penyidikan dan penuntutan perkara yang tidak selesai dalam waktu dua tahun. Pembentukan dewan pengawas ini sangat fatal pelaksanaannya berkaitan dengan fungsi penindakan KPK. Dewan pengawas diberikan kewenangan sama seperti kewenangan hakim dalam menilai layak atau tidaknya penyadapan dilakukan. Bila dicermati, pengawasan terhadap KPK sebelum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dirubah, KPK sejatinya telah memiliki berbagai pengawasan, baik sifatnya pengawasan internal, semi internal maupun eksternal. Setelah dibentuknya dewan pengawas KPK saat ini, muncul pertanyaan sifat pengawasan seperti apa yang dilaksanakan oleh Dewan pengawas, apakah sifatnya internal, semi internal atau eksternal?. Yang perlu dipahami jika sebelumnya KPK telah memiliki lembaga pengawas internal yakni Komite Etik dibentuk berdasarkan

²⁸ Abdul Latif, "JAMINAN UUD 1945 DALAM PROSES HUKUM YANG ADIL," *Jurnal Konstitusi* 7, no. 1 (2010): 49–66, 51.

²⁹ Lihat Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi hlm 58. Ulasan mengenai diperlukannya membentuk Dewan Pengawas, Pemberian Kewenangan SP3, Limitasi kewenangan penindakan serta izin penyadapan terdapat dalam Bab IV Jangkauan, Arah Pengaturan dan Ruang Lingkup Materi Muatan Undang-Undang Naskah Akademik tersebut.

Keputusan KPK Nomor 6 Tahun 2004 tentang Komite Etik Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. Menurut Deni Indrayana dalam pengujian oleh publik (*Public Review*) terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Komite Etik merupakan lembaga pengawas internal yang keberadaannya di dalam tubuh KPK berfungsi untuk melakukan pemeriksaan terhadap komisioner yang melakukan pelanggaran etika dalam melaksanakan tugas. Komite Etik ini bukan merupakan lembaga khusus yang sifatnya permanen, tetapi keberadaannya “*ad hoc*” atau dibutuhkan ketika adanya aduan pelanggaran etika yang dilakukan komisioner KPK.³⁰

Pengawasan semi internal juga dilaksanakan KPK yakni KPK diberi kewenangan melaksanakan fungsi supervisi dan koordinasi dengan Kepolisian dan Kejaksaan dalam penyelidikan, penyidikan maupun penuntutan perkara tindak pidana korupsi. Kewenangan supervisi (pengambil alihan perkara) haruslah dimaknai KPK sebelum mengambil alih perkara terlebih dahulu melakukan pengawasan, apabila dalam praktiknya terjadi kesulitan penanganan perkara oleh Kepolisian dan Kejaksaan maka KPK melakukan fungsi koordinasi lalu mengambil langkah supervisi. Begitupun sebaliknya, pasal 11 yang merupakan jantung dari fungsi penindakan KPK merupakan langkah bagi Kepolisian dan Kejaksaan melakukan pengawasan pula terhadap kinerja KPK. Artinya, terdapat fungsi pengawasan seimbang atau *check and balances* antara satu lembaga dengan lembaga lain dan fungsi yang demikian tepat dikategorikan sebagai model pengawasan semi internal (yang secara tidak langsung semi eksternal). Selanjutnya, KPK pun diawasi oleh lembaga lain yang berbeda fungsi seperti DPR, Pemerintah dan BPK. Model pengawasan demikian dinamakan pengawasan eksternal, artinya KPK wajib memberikan laporan kinerja, audit keuangan bahkan menyampaikan keterangan apabila dirasa DPR perlu melakukan audit terhadap kinerja KPK. Karena, hal demikian merupakan salah satu fungsi DPR yang berwenangan melakukan pengawasan kepada lembaga negara lain dan melakukan hak angket terhadap kinerjanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.³¹

Rumusan keliru lainnya terkait kewenangan penyadapan yang dilakukan KPK. Pembentuk undang-undang dalam merumuskan hal ini nampaknya tidak mengacu pada beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi terkait penyadapan seperti Putusan Nomor 006/PUU-1/2003, Putusan Nomor 010/PUU-IV/2006, Putusan Nomor 133/PUU-VII/2009 serta Putusan Nomor 81/PUU-X/2012.³² Setelah beberapa kali diuji materiil pasal yang berkaitan dengan kewenangan penyadapan oleh KPK, Mahkamah Konstitusi menafsirkan jika kewenangan penyadapan tidaklah bertentangan dengan UUD 1945 namun agar pelaksanaan kewenangan penyadapan yang dilakukan penegak hukum dalam melaksanakan fungsi *pro justitia* berjalan efektif, perlu dibentuknya suatu instrumen hukum yang mengatur ketentuan dan tata cara pelaksanaan penyadapan. Tetapi, justru pembentuk undang-undang saat ini mempersempit ruang gerak KPK melakukan penyadapan dengan mengatur harus diberikan izin terlebih dahulu terkait penyadapan oleh Dewan Pengawas yang pembentukan lembaganya saja tidak

³⁰ Indonesia Corruption Watch, *Pengujian oleh publik (public review) terhadap rancangan Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, terdiri dari Majelis Eksaminasi yakni Prof. Dr. Indriyanto Seno Aji, S.H.,M.H., Prof. Deni Indrayana, S.H.,L.L.M.,Ph.D., Dr. Arif Setiawan, S.H.,M.H., Dr. Bambang Widjojanto, S.H.,M.H., dan M. Nur Sholikin, S.H, (Jakarta: Indonesia Corruption Watch, 2016), 136.

³¹ Mei Susanto, “HAK ANGKET SEBAGAI FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT,” *Jurnal Yudisial* 11, no. 3 (2018): 385–406, 389, DOI: 10.29123/jy.v11i3.326.

³² Beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut terkait kewenangan KPK melakukan penyadapan tidak dapat dikatakan inkonstitusional karena KPK sebagai lembaga penegak hukum lain (kepolisian dan kejaksaan) berwenang melakukan penyadapan guna kepentingan penyelidikan maupun penyidikan perkara tindak pidana korupsi yang tetap dibatasi oleh ketentuan Undang-Undang (KUHP) dalam menjaga prinsip “*due process of law*”. Dalam beberapa putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, diantaranya dalam Putusan Nomor 06/PUU-1/2003, Mahkamah Konstitusi menyatakan jika dikemudian hari perlu ditetapkan perangkat peraturan yang mengatur syarat dan tata cara penyadapan.

jelas. Tentu pengaturan kewenangan penyadapan ini haruslah dipandang baik demi efektivitas penegakan hukum tindak pidana korupsi, tetapi sekali lagi, pembentuk undang-undang keliru mengatur kewenangan KPK dalam melakukan penyadapan tanpa landasan hukum yang mendasarinya, kecuali jika saat ini telah ada perangkat hukum yang mengatur kewenangan penegak hukum melakukan penyadapan (Undang-Undang Penyadapan) maka dapat dipastikan landasan pasal yang mengatur kewenangan penyadapan KPK dalam Undang-Undang KPK berdasar pada Undang-Undang Penyadapan.

Rumusan keliru yang terakhir yakni terkait kewajiban KPK mengeluarkan Surat Penghentian Penyidikan (SP3) apabila kasus tersebut menggantung selama dua tahun. Pembentuk undang-undang kembali menegaskan yurisprudensi terkait kewenangan SP3 yang dilakukan KPK. Dalam Putusan Nomor 06/PUU-1/2003, Mahkamah Konstitusi menyatakan kewenangan KPK tidak mengeluarkan Surat Pemberhentian Penyidikan tidaklah inskonstitusional, sebab apabila fakta yang terjadi tidak ditemukannya suatu tindak pidana maka penuntut umum lebih baik tetap membawa terdakwa ke persidangan daripada mengeluarkan SP3 guna kepentingan terdakwa, kepentingan publik dan kepentingan penegak hukum sendiri. Kepentingan terdakwa ialah tetap memberikan kepastian hukum bebasnya ia dari ketidakbersalahan melalui putusan pengadilan, kepentingan publik guna khalayak umum dapat menilai secara objektif alasan seseorang didakwa melakukan tindak pidana korupsi dan kepentingan penegak hukum guna menghindari prasangka atau praduga dari adanya permainan dalam proses penyidikan tindak pidana korupsi. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut pun menyatakan jika diberikannya kewenangan SP3 oleh KPK, justru potensi penyalahgunaan kewenangan tersebut dapat dilakukan tanpa diketahui oleh DPR, Pemerintah dan masyarakat secara luas. Namun dengan catatan, apabila dalam jangka waktu tahun (seandainya) penyidik KPK tidak berhasil menemukan dua alat bukti yang sah seseorang diduga melakukan tindak pidana korupsi maka KPK wajib membawa tersangka tersebut ke pengadilan, apabila hal tersebut tidak dilakukan maka Kepolisian atau Kejaksaan dapat melaporkan hal tersebut kepada DPR dengan alasan tidak dijalankannya suatu ketentuan pasal dalam Undang-Undang KPK agar dapat dilakukannya angket kepada KPK terhadap hal tersebut.

C. Kesimpulan

Setelah menguraikan penjelasan rumusan materi perubahan undang-undang KPK, baik yang sesuai maupun tidak sesuai dengan konsep lembaga negara indepen, penulis memberikan kesimpulan jika Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi belum memperkuat independensi kewenangan penindakan KPK dan justru semakin melemahkan kewenangan penindakan KPK dibandingkan dengan independensi kewenangan penindakan korupsi KPK pada undang-undang sebelumnya. Hal tersebut dikarenakan masih terdapatnya pengaturan pasal yang mengintervensi kewenangan independensi KPK dalam melaksanakan tugas dan fungsi seperti kewenangan penyadapan harus dilakukan sesuai dengan izin dengan pengawas, pengaturan penyadapan diatur dalam pasal perubahan undang-undang KPK dengan tidak mendahului pembentukan undang-undangan tentang penyadapan, pengaturann kewajiban mengeluarkan SP3 dalam jangka waktu tertentu yang tidak sesuai dengan berbagai Putusan Mahkamah Konstitusi yang memutus pengujian terkait kewenangan SP3 oleh KPK, tidak sesuai dengan teori konsep lembaga negara independen baik menurut ahli maupun konvensi internasional.

Penulis memberikan saran dalam perumusan perubahan Undang-Undang KPK dikemudian hari (jika dilakukan) harus mengacu kepada berbagai Putusan Mahkamah Konstitusi yang memutus terkait persoalan KPK, dan merubah kewenangan penindakan korupsi yang dimiliki KPK sesuai dengan berbagai Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut

dikarenakan independensi kewenangan penindakan yang dilakukan KPK merupakan jantung KPK dalam melakukan penindakan tindak pidana korupsi dan tidak dimiliki oleh lembaga lain yang berwenang melakukan penindakan tindak pidana korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Jurnal

- Astomo, Putera. "PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG DALAM RANGKA PEMBAHARUAN HUKUM NASIONAL DI ERA DEMOKRASI." *Jurnal Konstitusi* 11, no. 3, 2014: 577–599.
- Badjuri, Achmad. "PERANAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) SEBAGAI LEMBAGA ANTI KORUPSI DI INDONESIA (THE ROLE OF INDONESIAN CORRUPTION EXTERMINATE COMMISSION IN INDONESIA)." *Jurnal Bisnis Dan Ekonomi (JBE)* 18, no. 1, 2011: 84–96.
- Baskoro, Bambang Dwi. "PERSETERUAN KPK DENGAN POLRI DALAM UPAYA PEMBERANTASAN KORUPSI." *Masalah-Masalah Hukum* 42, no. 3, 2013: 336–345, DOI: 10.14710/mmh.42.3.2013.336-345.
- Eddyono, Luthfi Widagdo. "INDEPENDENCE OF THE INDONESIAN CONSTITUTIONAL COURT IN NORMS AND PRACTICES." *Constitutional Review* 3, no. 1, 2017: 71–97, DOI: 10.31078/consrev314.
- Hiariej, Eddy Omar Sharif. "UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST CORRUPTION DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA." *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 31, no. 1, 2019: 112–125, DOI: 10.22146/jmh.43968.
- Julpikar. "KEDUDUKAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DALAM PENETAPAN DAN PENGAWASAN APBN DI INDONESIA." *De Lega Lata* 1, no. 1, 2016: 162–183.
- Latif, Abdul. "JAMINAN UUD 1945 DALAM PROSES HUKUM YANG ADIL." *Jurnal Konstitusi* 7, no. 1, 2010: 49–66.
- Mahardika., Wijaya, Firman. "KAJIAN YURIDIS FUNGSI PENCEGAHAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI PENGADAAN BARANG DAN JASA SECARA ELEKTRONIK DI PROVINSI DKI JAKARTA." *Jurnal Hukum Adigama* 1, no. 2, 2019: 1–25, DOI: 10.24912/adigama.v1i2.2925.
- Muhtar, Mohamad Hidayat. "MODEL POLITIK HUKUM PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA DALAM RANGKA HARMONISASI LEMBAGA PENEGAK HUKUM." *Jambura Law Review* 1, no. 1, 2019: 68–93, DOI: 10.33756/jalrev.v1i1.1988.
- Nurtjahjo, Hendra. "LEMBAGA, BADAN, DAN KOMISI NEGARA INDEPENDEN (STATE AUXILIARY AGENCIES) DI INDONESIA: TINJAUAN HUKUM TATA NEGARA." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 35, no. 3, 2017: 275–287, DOI: 10.21143/jhp.vol35.no3.1518.
- Rishan, Idul. "BATAS KONSTITUSIONAL PENGGUNAAN HAK ANGKET TERHADAP KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI." *Jurnal Konstitusi* 16, no. 3, 2019: 630–654, DOI: 10.31078/jk1639.
- Rishan, Idul. "RELEVANSI HAK ANGKET TERHADAP KOMISI NEGARA INDEPENDEN." *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi* 10, no. 1, 2018: 44–64. DOI: 10.28932/di.v10i1.1031.
- Sulardi., Sastra, Irmayadi. "CHECK AND BALANCES KEKUASAAN LEMBAGA NEGARA GUNA MENATA PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNMENT)." *Jurnal Hukum Replik* 5, no. 2, 2017: 184–199, DOI: 10.31000/jhr.v5i2.926.

Susanto, Mei. "HAK ANGKET SEBAGAI FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT." *Jurnal Yudisial* 11, no. 3, 2018: 385–406, DOI: 10.29123/jy.v11i3.326.

Suyatmiko, Wawan Heru, and Alvin Nicola. "MENAKAR LEMBAGA ANTIKORUPSI: STUDI PENINJAUAN KINERJA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI." *Jurnal Antikorupsi Integritas* 5, no. 2, 2019: 35–36, DOI: 10.32697/INTEGRITAS.V5I2.465.

B. Buku

Atmasasmita, Romli dkk. *Sisi Lain Akuntabilitas KPK dan Lembaga Pegiat Anti Korupsi*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.

Indonesia Corruption Watch. *Pengujian oleh publik (public review) terhadap rancangan Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Indonesia Corruption Watch, 2016.

Indrayana, Denny. *Jangan Bunuh KPK Kajian Hukum Tata Negara Penguatan Komisi Pemberantasan Korupsi*. Malang: Instrans Publishing, 2016.

Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia. *Komitmen Global Indonesia Pada United Nations Convention Against Corruption dan G20 Anti-Corruption Working Group (ACWG) Tahun 2012-2018. Jakarta's Principle*. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, 2019.

MD, Mahfud. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.

Salim, HS., Septiana, Nurbaini Erlies. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.

C. Internet

<http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/prolegnas-2015-2019.html>, diakses pada 3 Mei 2020.

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5e006f96d6231/apa-itu-ipro-justitia-i/>, diakses pada 28 April 2020.